

Problematik Pendidikan Indonesia Masa Kini

Anry Krismanto Nababan^{1*}, Binur Panjaitan²

Program Studi S3 Teologi, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Abstrak:

Pendidikan di Indonesia sampai saat ini belum jelas akan ke mana arahnya, belum bisa merata antara daerah satu dan daerah yang lain. Pemerintah sampai saat ini masih mengalami kebingungan apa yang akan mereka harapkan dan mereka pakai untuk menuju masyarakat pembelajar di negeri ini. Sehingga, banyak nilai pelajaran yang diambil dari luar atau diadopsi dari negara-negara yang sudah maju. Meskipun ada sisi positifnya, namun juga tidak boleh dikesampingkan sisi negatif dari pengadopsian kurikulum dari negara lain. Pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat bahu-membahu dalam upaya mengembangkan bangsa melalui jalur pendidikan. Karena, tanpa adanya saling bekerjasama tidak mungkin semua akan tercapai dengan baik. Sebagai harapan kami nilai-nilai religi harus selalu sebagai landasan bagi semua pihak dalam melaksanakan roda pendidikan ini. Semoga bangsa ini segera sembuh dari keterpurukan dan pembodohan yang tersistematis.

Kata Kunci: pendidikan, pemerintah, religi, sekolah

Abstract:

Education in Indonesia is not yet clear where it will go, not yet can be evenly distributed between one region and another. The government is still experience confusion as to what they would expect and use to go learning community in this country. Thus, many of the lesson values are taken from outside or adopted from developed countries. Even though there is a positive side, the negative side of adopting a curriculum from another country should not be ruled out. The school, government, and community work hand in hand in the effort develop the nation through education. Because, without mutual cooperation, it is impossible for everything to be achieved properly. As our hope, religious values must always be the foundation for all parties in carrying out this educational wheel. Hopefully this nation will soon recover from systematic downturn and stupidity.

Keywords: education, government, religion, school

PENDAHULUAN

Kualitas peradapan suatu bangsa sangat bergantung pada bagaimana kualitas pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang menyadari dan memahami makna strategis pendidikanlah yang mampu meraih kemajuan dan menguasai dunia. Bagaimana pun, pendidikan merupakan alat paling penting bagi perubahan dan pencapaian kemajuan dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pelaku pendidikan maupun masyarakat umum sudah selayaknya membuka mata akan permasalahan bangsa khususnya yang dialami generasi saat ini. Buku pelajaran pelaku pendidikan saling bersaing menyuguhi peserta didik dengan bidang studi dari kacamata spesialis, padahal belum tentu semua pendidik ataupun buku pelajaran mampu

*Anry Krismanto Nababan, Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
Email: pendetaanry@gmail.com

mengkoneksikannya dengan pengalaman peserta didik. Bahan keilmuan belum dapat diterjemahkan ke dalam istilah-istilah kehidupan, melainkan secara langsung disodorkan sebagai pengganti kehidupan peserta didik, atau sebagai suntikan pada kehidupan peserta didik saat ini.¹ Begitu juga dengan Mutu pendidikan yang instan yang menjadi momok bagi orang tua. Materi ilmiah yang disampaikan pada tataran logispun akan akan kehilangan mutunya jika ditampilkan dalam bentuk siap pakai dihadapan peserta didik, bahkan fasilitator pendidikan pun belum bisa menunjukkan pengalaman kehidupan nyata. Daya-daya penalaran peserta didik, kemampuan mengabstrasikan dan menggeneralisasi, tidak berkembang memadai. Kontradiksi yang terlihat ialah peserta didik memperoleh mamfaat dari rumusan logis orang dewasa. Peserta didik pun tidak mendapat manfaat dari potensi-potensinya sendiri dalam memahami dan menanggapi masukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan. Contohnya penelitian dengan pendekatan kualitatif di bidang sosiologi, maka akan mengungkap makna sosial dari fenomena yang diperoleh subjek penelitian. Topik ini biasanya diterima dari partisipan atau responden. Dengan cara ini, peneliti dengan pendekatan ini kemudian berusaha menjawab bagaimana pengalaman sosial budaya manusia terbentuk dan kemudian diberi makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli

¹ Brigida Intan Printina, *Membumikan Moral dan Cita Benih Bangsa*, (Seleman: Penerbit deepublish, 2019), hlm. 1-2

mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.²

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan sebagai nilai karakter dan spiritual bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Selain dari itu Pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab dan pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.

Menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi (terwujud) dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Setiap negara maju tidak akan pernah terlepas dengan dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya. Pendidikan merupakan faktor penting bagi

² Haryanto, 2012: dalam artikel “pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 9 april 2017.

masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut.³

Keragaman di Indonesia alasan anak putus sekolah atau tidak sampai lulus ke jenjangan pendidikan SMA sederajat. Ada yang karena dari kemauan anaknya itu sendiri padahal dari segi ekonomi orang tuanya mampu untuk membiayai anaknya sekolah sehingga anaknya tersebut putus di tengah jalan saja, ada orang tuanya yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk menyekolahkan anaknya sehingga sekolahnya terpaksa putus begitu saja, dll. Beberapa factor yang membuat anak-anak di Indonesia putus sekolah diantaranya: Kondisi ekonomi orang tua, pengaruh teman yang tidak sekolah, dan juga pengaruh teman yang sering bolos sehingga di dikeluarkan dari sekolah, dll. Ini adalah merupakan salah satu permasalahan yang harus di selesaikan karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan juga berpengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan di masa depan anak.

Di samping itu ada beberapa faktor internal dan eksternal yang membuat anak-anak putus sekolah.⁴

1. Faktor Internal

- a. Anaknya terpengaruh oleh teman-teman yang sering membolos baik nungkrong diluar sekolah (tidak masuk sekolah), main plystation, sampai-sampai tidak naik kelas, sehingga dia berhenti sekolah.
- b. Anak-anak terpengaruh atau iri kepada teman-teman yang tidak sekolah karena enak pagi-pagi nyantai di rumah tidak sibuk untuk pergi sekolah.
- c. Karena lokasi sekolah jauh (untuk anak-anak yang mau melanjutkan kejenjangan pendidikan SMA sederajat) dan jalan kurang mendukung.
- d. Merantau di masa muda
- e. Karena banyaknya perkawinan di masa muda di Desa Banyunneng Laok
- f. Bangunnya sering kesiangan
- g. Nungkrongnya berlebihan
- h. Motivasi individu kurang

³ <http://www.kumpulandefinisi.com/2015/10/pengertian-definisi-tujuan-pendidikan-menurut-para-ahli.html>

⁴ <https://eprints.umm.ac.id/41375/3/BAB%20II.pdf>

2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya perhatian dari orang tua
- b. Orang tua ada di luar negeri (anak ditinggal)
- c. Latar belakang pendidikan orang tua
- d. Fasilitas gedung sekolah kurang mendukung
- e. Kurangnya pengajar atau guru
- f. Kurang aspirasi

Pendidikan Indonesia⁵

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi itu berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003), bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP). Dan, dari 8.036 SMA ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).

Saat ini Indonesia sedang berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada dan akan menetapkan kurikulum 2013, dengan berbagai “tuntutan” bagi peserta didik. Beberapa waktu yang lalu, program pemerintah setiap tahun akan meningkatkan standar kelulusan ujian nasional (UN) hingga mencapai kesetaraan dengan negara maju (Puskomda Surabaya Raya: 10 Mei 2008).⁶

Arah dan Tujuan Pendidikan Indonesia

Tidak sedikit sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, misalnya: gedung sekolah, alat-alat laboratorium, buku-buku di perpustakaan, dan sarana prasarana pendukung lain.

⁵ Dikutip melalui https://www.academia.edu/8482889/PENDIDIKAN_DI_INDONESIA, Penulis Marzhuu Ninomiya.

⁶ Puskomda Surabaya Raya. 2008. Potret Pendidikan Indonesia. <http://www.fsldkn.org/ke-ummat-an/potret-pendidikan-indonesia.html>. Diunduh pada 8 Januari 2008.

Pendidikan Indonesia sudah kehilangan arah. Pendidikan di Indonesia dalam bentuk sekolah telah tercabut dari akar kesejarahan sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia sudah tidak lagi bertumpu pada nilai-nilai dasar pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang menyadarkan, pendidikan yang memanusiakan manusia muda, dan pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Salah satu buktinya, pemerintah sekarang sedang menggalakkan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah atas berbasis kerja, yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK). Pemerintah berencana akan mengubah pola pendidikan Indonesia dengan perbandingan 70% untuk SMK dan 30% untuk sekolah menengah atas (SMA). Lulusan SMA dalam pandangan pemerintah hanya menghasilkan lulusan yang tidak siap kerja kalau tidak mau disebut pengangguran. Meskipun sekolah sudah menerapkan beberapa tipe atau kelas dalam program di antaranya: kelas akselerasi, bilingual, RSBI atau SBI, atau sekolah yang hanya berstandar SSN. Namun, dampak yang didapatkan dengan program ataupun kelas-kelas dalam sekolah tersebut bukan jawaban yang pas untuk mengarahkan pendidikan terhadap tujuan pendidikan nasional bahwa dengan pendidikan diharapkan seseorang bisa menjadi manusia yang seutuhnya.

Pergantian kurikulum maupun pergantian menteri bisa dikatakan progresif, namun juga bukan suatu pemecahan masalah karena implementasi dan kualitas sumber daya manusia khususnya pendidik di Indonesia yang terlalu beragam. Pendidikan di negeri ini sejauh ini hanya mengadopsi tren yang sedang berkembang di negara lain, yang Indonesia selalu bercermin dari negara-negara yang sudah maju, misalnya Amerika, Australia, dan juga Inggris. Pendidikan karakter, local wisdom atau kearifan lokal, kewirausahaan yang diintegrasikan, merupakan salah satu program yang sia-sia, karena pendidikan yang memegang peranan penting, yaitu pendidikan di dalam keluarga dan masyarakat tidak bisa sejalan dan seimbang Permasalahan Pendidikan Indonesia.

Masalah akses pemerataan pendidikan mulai dari sisi infrastruktur fisik dan pengembangan sumber daya manusia menjadi persoalan pokok yang harus teratasi dengan tepat dan efektif. Kesenjangan pembangunan sarana pendidikan dan pengembangan kecakapan sumberdaya manusia pada jenjang pendidikan dasar, akan

mempengaruhi upaya peningkatan kualitas layanan pembelajaran bagi peserta didik dilingkungan sekolahnya.⁷

Masalah penyelenggaraan pendidikan dari sisi input, proses, dan output menjadi dominan teknis yang patut untuk diperhatikan bagi seluruh stakeholder dilingkup Lembaga pendidikan dasar. Sebab, sebegus apapun sarana-prasarana dan kualitas sumber dasar manusia yang dimiliki oleh Lembaga sekolah, bila tidak ditunjang dengan sistem manajemen mutu sesuai dengan regulasi maupun standar pengelolaan pendidikan juga berdampak terhadap capaian mutu kelembagaan di lingkup sekolah dasar. Dengan demikian, arah pengembangan pendidikan dasar haruslah memenuhi aspek pemerataan.

Pemenuhan mutu sarana dan prasarana juga belum sepenuhnya memadahi juga mempengaruhi kualitas mutu layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Secara nasional, merujuk pada data BPS (2004) dilaporkan secara aspek fisik menunjukkan baru 27,6 % SD yang sudah memiliki perpustakaan sekolah. Di samping itu, terjadi sebaran yang kuran merata menurut provinsi. Di Yogyakarta, misalnya, terdapat 72,8% SD yang memiliki perpustakaan sedangkan di Maluku Utara hanya lima persen yang sudah memiliki perpustakaan sekolah. Belum lagi, banyak sarana pendidikan yang rusak dan tidak layak ini merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan. Dari 1,3 juta ruang kelas, 769 ribu dalam kondisi layak pakai (59%), 299 ribu rusak berat (23%) dan 242 rusak ringan (18%). Pada tahun 2012 sudah 22 ribu ruang kelas yang diperbaiki. Proyek perbaikan sekolah ini tidak akan pernah selesai. Sekolah yang sekarang masuk dalam kategori ringan akan naik menjadi rusak sedang, lalu rusak berat jika ditangani tentunya akan menjadi rusak berat, sehingga akan berdampak negatif terhadap mutu pengembangan dan layanan penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi infrastruktur sekolah dasar contohnya yang belum memadai dan merata juga mengindikasikan masih minimnya kemampuan fiskal setiap Lembaga sekolah dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan semua potensi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Sebab, ketidak kemampuan fiskal atau alokasi anggaran operasional yang bersumber dari dana APBN dan APBD yang merata serta memadai juga berimplikasi pada setiap kebijakan tata kelolah pengembangan mutu Lembaga sekolah. Bahkan sekolah swasta di daerah pelosok, jangankan untuk membangun

⁷ Dr Mohamad Hasan, *Pengantar Pendidikan Indonesia: Arah Baru Dalam Membentuk Profil Pelajar Pancasila*, (Jakarta: Penerbit Tahta Media Group, 2001), hlm. 10

Gedung yang representatif, malah banyak guru yang belum menerima upah minimum sesuai standar upah minimum masing-masing Kabupaten/Kota pada setiap provinsi. Sehingga kata sejahtera bagi para guru honorer pada Lembaga sekolah swasta di daerah pelosok masih jauh dari kata sejahtera. Padahal, peran dan fungsi para guru honorer dan sekolah swasta, juga dinilai sama-sama berperan dalam memajukan pendidikan Indonesia.⁸

Rendahnya mutu sumber daya manusia dan relevansi pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi pembangunan pendidikan di Indonesia termasuk juga berkaitan dengan pembengunan pendidikan dasar. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan ini berkaitan erat dengan mutu akademis tenaga pendidik terutama para guru dalam melakukan inovasi.

Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia⁹

1. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

2. Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/SO sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama

⁸ Pengantar Pendidikan Indonesia: Arah Baru dalam Pelajaran, (Tahta Media Group,), hlm. 190-191

⁹ Dikutip melalui https://www.academia.edu/8482889/PENDIDIKAN_DI_INDONESIA, Penulis Marzhuu Ninomiya

pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

3. Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana.

Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, "sesuai keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya. Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada

pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit. Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005). Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin. Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda Kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-

Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi. Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan. Di bawah ini akan dijelaskan salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia secara umum, yaitu kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyatakan, salah satu paradigma yang harus di hapuskan adalah wajib belajar sembilan tahun agar menjadi hak belajar sembilan tahun. “masyarakat punya hak untuk menuntaskan sembilan tahun pendidikan. Kalau itu menjadi hak, maka negara harus menyiapkan seluruh sarana dan prasarana. Semua bisa menuntut pendidikan sembilan tahun,” katanya saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan 2010. Peningkatan pemerataan pendidikan, diutamakan bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk. Problem mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih

tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ini terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang tidak berkecukupan. Akses tempat tinggal pun dapat menjadi faktor rendahnya pendidikan masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang biasanya bertempat tinggal di desa-desa memiliki akses masuk ke dalam masyarakat miskin pun perekonomian menjadi lebih baik. Disini terlihat dari Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah namun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mampu mengelola SDA yang melimpah kurang dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak hanya ditekankan pendidikan formal saja untuk dapat mengelola SDA, bisa saja pelatihan diselenggarakan pemerintah untuk warga miskin agar mungkin dapat memajukan dan membangun perekonomian. Fenomena yang ada di Indonesia cukup ironis. Banyaknya lulusan sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi setiap tahunnya, ternyata tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang disediakan. Hal itu jelas menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Bahkan angka pengangguran mencapai 9,5% per tahun. Untuk menuju pemerataan pendidikan yang efektif dan menyeluruh, kita perlu mengetahui beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pendidikan kita. Permasalahan itu antara lain mengenai keterbatasan daya tampung, kerusakan sarana prasarana, kurangnya tenaga pengajar, proses pembelajaran yang konvensional, dan keterbatasan anggaran. Pengaruh pendidikan masyarakat miskin menjadi rendah. Pemerataan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggaraan pendidikan yang berbunyi : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”. Hal ini juga tercantum dalam BAB IV pasal 5 bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yang berbunyi: 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, 2) Warga

negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional diharapkan menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya untuk seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadivahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Olehkarena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut untuk menyiapkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunanseharusnya juga mulai diperhatikan bagaimana peningkatan mutunya. Mutu pendidikan dilakukan pertama oleh setiap institusi pendidikan yang selanjutnyadilakukan oleh lembaga pemakaikeluarganya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan sebagai kriteria maka pertanyaannya adalah : apakah keluaran dari setiap institusi pendidikan menjadikan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kebijakan yang tidak seimbang antara pemerataan dan mutu pendidikan telah membawa dampak negatif robok di mana-mana seperti tawuran antarpelajar di berbagai kota dan profesionalisme guru yang rendah merupakan dampak negatif yang dapat kita rasakan. Dalam kaitan tersebut, mutu pendidikan seharusnya menjadi tujuan akhir semua strategi pemerataan pendidikan, relevansi, dan manajemen pendidikan. Artinya, semua strategi pembangunan pendidikan harus berorientasi kepada mutu pendidikan. Pemerataan pendidikan harus tetap berorientasi pada mutu pendidikan. Relevansi dan manajemen pendidikan tidak lain juga harus berorientasi kepada mutu pendidikan. Maka lahirlah istilah yang disebut pemerataan pendidikan yang bermutu, relevansi pendidikan yang bermutu, dan manajemen pendidikan yang bermutu. Dengan kata lain, semua strategi pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan kreativitas pembelajaran bagi pembentukan pengalaman belajar siswa dilingkup satu pendidikan.

Membangun Kesadaran Kritis

Untuk mampu membangun kesadaran kritis maka proses pendidikan harus mencerdaskan sekaligus membebaskan generasi untuk menjadi pelaku utama, bukan sasaran pelaku dari proses tersebut. Ada suatu pengalaman kelompok yang terlibat dalam suatu peristiwa. Keabsahan pengetahuan seseorang ditentukan oleh pembuktiannya dalam realitas Tindakan atau pengalaman langsung, bukan retorika semata. Dalam proses pendidikan berlaku “guru sekaligus siswa” di saat yang bersamaan. Ada pula kegiatan dialogis yaitu proses komunikasi dalam bentuk studi kasus atau wawancara, bahkan penggunaan media lebih memungkinkan terjadinya dialogi kritis antar semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Dengan menggunakan metode kritis kiranya berbagai masalah pendidikan dapat disoroti lebih banyak dan berbagai ilmu dapat bersama mem bahas nya.

Tugas utama pelaku pendidikan ialah menciptakan ruang agar mampu menghasilkan pribadi bersikap kritis terhadap sistem, struktur ketidakadilan, diskriminasi, radikalisme dan segala bentuk atau proses ke arah the *dominat ideology* praktis ke arah transformasi sosial dengan memanfaatkan teknologi tanpa menghilangkan karakter sebagai pribadi yang beradab, berbangsa dan berdaulat.¹⁰ Guru sebaiknya mengetahui dengan jelas perkembangan pendidikan dari zaman ke zaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Guru memiliki peranan dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah pendewasaan terhadap peserta didik, membekali peserta didik dengan ilmu dan pengetahuan. Pendidikan merupakan tahu, mengembangkan, menerapkan dan mempraktekannya. Pendidikan guru di masa depan menghadapi tantangan tidak ringan, baik tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal berupa peraturan perundangan terkait dengan pendidikan dan guru yang saat ini berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen serta peraturan yang mengiringi. Sedangkan tantangan

¹⁰ Brigida Intan Printina, *Membumikan Moral dan Cita Benih Bangsa*, (Seleman: Penerbit deepublish, 2019), hlm. 13-14.

eksternal berupa tantangan dunia global yang akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawab guru di masa depan.

Saran

Teknologi yang bijak. Teknologi menjadi bijak bilamana digali pada kedalaman reflektif seperti ilmu-ilmu lain. Seperti ungkapan Ernst Junger (1983, 269), “Teknologi adalah cara Gestalt dari pekerja memobilisir dunia” Gestalt dalam hal ini adalah “keseluruhan pandangan hidup”. N. Berdyaev juga berpendapat bahwa ada berbagai macam Angkatan kebutuhan teknologi, tergantung dari cita-cita kemanusiaan yang ingin diwujudkan. “Teknologi merupakan system kegiatan melalui manusia yang berusaha merealisasikan program ektranatural, yaitu dirinya sendiri. Sastrapratedja menambahkan arti kedalaman teknologi yang sangat erat kaitannya antara alam dengan dunia social. Perlu pemahaman guna membatasi antara “ilmu” dengan teknologi. Dengan demikian, perbedaannya dapat ditemukan pada tujuan akhir. Kegiatan ilmiah bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang alam dan dunia social dengan penjelasan sistematik tentang fenomena, sedangkan kegiatan teknologi memiliki tujuan memecahkan persoalan kehidupan manusia dengan meningkatkan kemampuan kita mentransformasi alam dan dunia social. Teknologi dibagi dalam beberapa unsur seperti pengetahuan, ketrampilan, peralatan, penggunaan teori atau metode ilmiah, yang menjadi tujuan dalam pemilihan Tindakan untuk mewujudkan suatu tujuan guna pemecahan masalah. Sejalan dengan itu Bernie Trilling dan Charles Fadel mengharmonisasikan kesiapan manusia menghadapi era digital dengan mengembangkan keterampilan di abad 21. Ada Creativity and innovation dimana setiap orang dapat mengembangkan kreativitas dan membuat inovasi atau pembaharuan terus menerus. Orang pandai dituntut untuk kreatif, agar kepandaiannya berguna bagi diri dan orang lain. Setiap orang harus mampu berkreasi dan mampu membuat perubahan. Setiap orang di Era ini tidak hanya melakukan perintah namun juga dapat menciptakan gagasan baru untuk menginspirasi sesama demi kemajuan. Kemudian ada Digital Literacy skill yaitu penguasaan pada computer dan teknologi. Dengan kemampuan digital, kita semakin mampu berkomunikasi dan membangun jaringan kemana pun, sehingga gagasan yang lain akan tersebar dan setiap orang diperkaya oleh gagasan yang lewat dunia digital. Selain itu, setiap orang dapat bekerja sama dengan banyak orang dari berbagai sudut dunia tanpa harus bertemu secara fisik.

Pendidikan mengambil andil untuk mengatasi keterbatasan manusia memaknai teknologi untuk mengubahnya menjadi nilai. Maka setiap generasi baru memperkuat diri dengan intelektual, social, spiritual, moral, afektif, fisik, estetik, emosi, sehingga mampu menanggapi teknologi dengan daya kritis, inovatif, moralitas tinggi.¹¹

DAFTAR PUSTAKA

Brigida Intan Printina. 2019. *Membumikan Moral dan Cita Benih Bangsa*, Seleman: Penerbit deepublish.

Haryanto, 2012: dalam artikel “pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 9 april 2017.

Mohamad Hasan, *Pengantar Pendidikan Indonesia: Arah Baru Dalam Membentuk Profil Pelajar Pancasila*. 2001. Jakarta: Penerbit Tahta Media Group.

Puskomda Surabaya Raya. 2008. *Potret Pendidikan Indonesia*. <http://www.fsldkn.org/ke-ummat-an/potret-pendidikan-indonesia.html>. Diunduh pada 8 Januari 2008.

<http://www.kumpulandefinisi.com/2015/10/pengertian-definisi-tujuan-pendidikan-menurut-para-ahli.html>

<https://eprints.umm.ac.id/41375/3/BAB%20II.pdf>

https://www.academia.edu/8482889/PENDIDIKAN_DI_INDONESIA, Penulis Marzhuu Ninomiya.

¹¹ Brigida Intan Printina, *Membumikan Moral dan Cita Benih Bangsa*, (Seleman: Penerbit deepublish, 2019), hlm. 9-11.